

**PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
MELALUI ARBITRASE**

INTISARI

Abdul Rahman Maulana Siregar*
Sutanto**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk dapat menganalisis dan mengkaji penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa konsumen serta untuk dapat menganalisis dan mengkaji perbedaan kekuatan mengikat putusan arbitrase oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif didukung oleh data yang diperoleh di lapangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan data sekunder, mengumpulkan data-data yang bersumber pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai literatur ilmiah, buku-buku, majalah, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan hasil karya dari kalangan hukum, serta sumber pustaka lainnya. Data dalam penelitian hukum normatif yakni data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap permasalahan sengketa konsumen yang terjadi, diharapkan konsumen mengajukan permasalahan tersebut dengan secepat mungkin, mengidentifikasi permasalahannya, mengumpulkan bukti yang mendukung dan menyesuaikannya dengan komoditi yang ada, dan menyimpan bukti asli dan menunjukkan fotocopy sebagai buktinya. Sementara kekuatan hukum putusan yang diberikan BPSK berdasarkan UUPK dan juga Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 saling bertentangan sehingga dalam hal ini putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat boleh dikatakan sangat lemah.

Kata Kunci : Putusan Arbitrase, Final dan Mengikat

* Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

** Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Magister Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

THE ROLE OF THE BOARD OF SOLUTION DISPUTE CONSUMER IN SOLUTION DISPUTE CONSUMER THROUGH ARBITRATION

ABSTRACT

Abdul RahmanMaulanaSiregar*
Sutanto**

The purpose of this study is to analyze and assess the consumer dispute resolution by The Board Of Solution Dispute Consumer (BPSK) to resolve consumer disputes and to be able to analyze and assess differences in the strength of binding arbitration award by The Board Of Solution Dispute Consumer in resolving consumer disputes according to the Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection by act Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

The research method used is the method of normative legal research was supported by the data obtained in the field. Normative legal research is research using secondary data, collect data that originates in literature studies using various scientific literature, books, magazines, documents, legislation, and the works of the law, as well as other literature sources. Data in the normative legal research data obtained directly from the subject of research.

The results showed that consumers are dispute problems to occur, it is expected the consumer submits the issue as soon as possible, identify the problem, gather evidence to support and customize it with the existing commodities, and save the original evidence and shows a copy as proof. While the verdict is given legal force BPSK based UUPK and also the decision of the Minister of Industry and Trade of The Republic of Indonesia Number 350/MPP/Kep/12/2001 contradictory so that in this case BPSK decision which is final and binding binding can be very weak.

Keywords : Arbitration Decision, final and binding

* Students of The Faculty of Law, Master of Law Litigation, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

** Lecturer of Law Faculty Supervisor, Master of Law Litigation, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

DAFTAR BAGAN

Bagan I : Struktur Organisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintahan Kota Medan Periode 2014-2019.....	54
Bagan II : Struktur Organisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintahan Kota Binjai Periode 2010-2015	56
Bagan III : Tata Cara Penyelesaian / SOP Beracara di BPSK	65
Bagan IV : Struktur Kepengurusan BANI Perwakilan Kota Medan Periode Tahun 2014-2019	84